AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik
Vol. 2 (No.2), 2026: 144-157
https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/91

Integrasi *ESG* dalam Manajemen Anggaran Sektor Publik: Sintesis Awal Atas *Green Budgeting* dan Participatory Budgeting pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Integrating ESG into Public Sector Budget Management: A Preliminary Synthesis of Green Budgeting and Participatory Budgeting in Local Governments in Indonesia

Nurlina
Politeknik Wahdah Islamiyah, Makassar; Email: nurlina.lina290887@gmail.com

Article History
Received : 2026-09-13
Revised : 2026-09-20
Accepted : 2026-10-30
Published: 2026-11-01

Keywords:
ESG, green budgeting, participatory budgeting

Corresponding author:
nurlina.lina290887@gmail.com
andi.faisal@unm.ac.id

Paper type:
Research paper



Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Wahdah Islamiyah

Abstract

The environmental, social, and governance (ESG) framework is expanding rapidly within the corporate finance sector; however, its application to public sector budget management remains fragmented. This paper provides an initial synthesis of literature on green budgeting and participatory budgeting—including gender-responsive budgeting and sustainable public procurement—that relates to the three dimensions of ESG. Based on a phased literature search and direct verification of seventeen primary studies and four comparative literature reviews—covering contexts in Indonesia, Ghana, Italy, Mexico, Uruguay, Colombia, Australia, Germany, South Korea, France, Austria, the Netherlands, Sweden, and Brazil, as well as the African and Latin American regions, nine European nations, and a panel of 107 countries—this synthesis finds that the literature for each dimension has developed independently, lacking a unifying analytical framework. The environmental dimension is typically examined through cross-country quantitative studies; the social dimension frequently employs qualitative and policy-narrative approaches (notably in the Indonesian context); and the governance dimension continues to face challenges regarding inconsistent measurement across studies. Two cross-cutting findings warrant emphasis. First, "green" or "participatory" labeling does not automatically yield substantive impact; this is evidenced by the negative moderating effect of "green budget tagging" in Ghana and the distributive inequities associated with municipal green bonds in Africa, Latin America, and the United States. Second, the quality of citizen engagement is a more significant determinant of fiscal and social outcomes than the mere existence of participatory mechanisms—a pattern consistently observed in studies from South Korea, Solo (Indonesia), and Paris. This synthesis concludes that the integration of ESG into public sector budget management remains an open research agenda. It further suggests that future research should incorporate a comprehensive, systematic literature search following PRISMA protocols before any claims regarding novelty or the full scope of the existing literature can be definitively substantiated.

Abstrak

Kerangka environmental, social, and governance atau ESG berkembang pesat di sektor keuangan korporat, tetapi penerapannya pada manajemen anggaran sektor publik masih terfragmentasi. Naskah ini menyusun sintesis awal atas literatur green budgeting dan participatory budgeting, termasuk anggaran responsif gender dan pengadaan publik berkelanjutan, yang relevan dengan tiga dimensi ESG. Berdasarkan penelusuran literatur bertahap dan verifikasi langsung atas tujuh belas studi primer dan empat tinjauan literatur pembanding, mencakup konteks Indonesia, Ghana, Italia, Meksiko, Uruguay, Kolombia, Australia, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Austria, Belanda, Swedia, Brasil, kawasan Afrika dan Amerika Latin, sembilan negara Eropa, serta panel 107 negara, sintesis ini menemukan bahwa literatur pada tiap dimensi berkembang terpisah tanpa kerangka analitis yang menyatukannya. Dimensi environmental cenderung diteliti lewat studi kuantitatif lintas negara, dimensi social banyak memakai studi kualitatif dan naratif kebijakan khususnya di Indonesia, dan dimensi governance masih menghadapi masalah pengukuran yang tidak konsisten antar studi. Dua temuan lintas studi perlu digarisbawahi. Pertama, pelabelan hijau atau partisipatif tidak otomatis menghasilkan dampak substantif, terlihat pada efek moderasi negatif green budget tagging di Ghana dan pada ketidakadilan distributif obligasi hijau munisipal di Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Kedua, kualitas keterlibatan warga lebih menentukan hasil fiskal dan sosial dibanding sekadar keberadaan mekanisme partisipasi, terlihat konsisten pada studi di Korea Selatan, Solo, dan Paris. Sintesis ini menyimpulkan bahwa integrasi ESG dalam manajemen anggaran sektor publik masih berupa agenda penelitian terbuka, dan menyarankan penelitian lanjutan dengan pencarian sistematis penuh mengikuti protokol PRISMA sebelum klaim novelty dan cakupan literatur dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.

Copyright @ 2026 Authors.

Cite this article:

Nurlina. (2026). Integrasi ESG dalam Manajemen Anggaran Sektor Publik: Sintesis Awal Atas Green Budgeting dan Participatory Budgeting pada Pemerintah Daerah di Indonesia. AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik, *2*(2), 144-157. https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/91.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Kerangka ESG berkembang dari dunia investasi korporat, dipakai lembaga pemeringkat untuk menilai risiko non-finansial perusahaan. Perluasan kerangka ini ke ranah keuangan negara sudah punya bukti empiris. Capelle-Blancard, Crifo, Diaye, Oueghlissi, dan Scholtens (2017) menemukan bahwa negara dengan kinerja ESG lebih baik memiliki spread obligasi negara yang lebih rendah, dengan dimensi governance berpengaruh lebih kuat dibanding dimensi sosial, sementara dimensi lingkungan secara terpisah tidak berpengaruh signifikan. Studi ini menunjukkan ESG relevan bagi keuangan negara, tetapi fokusnya pada pasar modal antarnegara, bukan pada siklus anggaran domestik pemerintah.

Pada sisi manajemen keuangan sektor publik, tiga aliran literatur berkembang secara terpisah: green budgeting, participatory budgeting termasuk anggaran responsif gender, dan transparansi atau akuntabilitas fiskal. Ketiganya masing-masing sudah punya tinjauan literatur sistematis pada level internasional dan sebagian terbit dalam dua tiga tahun terakhir. Polzer, Nolte, dan Seiwald (2023) menyusun tinjauan literatur atas gender budgeting dan secara eksplisit menyatakan bahwa penelitian yang ada berfokus pada tahap ex ante, sementara tahap concurrent dan ex post kurang dipahami, dan literatur masih kekurangan kontribusi dari perspektif akuntansi publik. Bartocci, Grossi, Mauro, dan Ebdon (2023) menyusun tinjauan literatur sistematis atas participatory budgeting. Mol, van Schie, dan Budding (2025) menyusun tinjauan literatur terstruktur atas pendorong pelaporan keberlanjutan pemerintah daerah. Markovič Hribernik, Bratić, dan Prijaković (2025) mengulas determinan kredibilitas anggaran pemerintah lokal dan menemukan variasi luas dalam cara mengukur variabel kredibilitas anggaran antar studi.

Kepadatan tinjauan literatur pada masing-masing topik ini mengubah posisi kontribusi yang bisa diklaim naskah ini. Tinjauan yang hanya mengulang salah satu topik akan tumpang tindih dengan review yang sudah ada. Celah yang masih terbuka, berdasarkan penelusuran sejauh ini, ada pada dua sisi. Pertama, belum ditemukan tinjauan yang menyatukan green budgeting dan participatory budgeting di bawah satu kerangka analitis ESG. Kedua, Polzer dkk (2023) secara eksplisit menyatakan kurangnya kontribusi dari perspektif akuntansi publik dalam literatur gender budgeting, sebuah celah yang belum terisi oleh tinjauan manapun yang ditemukan dalam penelusuran ini.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana literatur memetakan green budgeting dan participatory budgeting ke dimensi environmental, social, dan governance, teori apa yang dipakai, metode apa yang dominan, dan kesenjangan apa yang tersisa khususnya untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia. Tujuannya adalah menyusun sintesis awal yang menjawab pertanyaan ini sebagai dasar penelitian lanjutan yang lebih sistematis.

2. Metode

Sintesis ini disusun dari pencarian bertahap memakai mesin pencari web pada Agustus 2026, dengan kombinasi kata kunci per dimensi

environmental, social, dan governance, serta istilah payung ESG, sesuai kerangka yang sudah disusun dalam protokol sebelumnya. Pada tahap perluasan, pencarian difokuskan pada sumber akses terbuka, jurnal MDPI, Frontiers, Cambridge Core, PLOS, repositori institusi, dan halaman abstrak publik penerbit besar, agar tidak bergantung pada akses Scopus tertutup. Artikel disaring berdasarkan relevansi terhadap konteks sektor publik, kredibilitas jurnal atau platform penerbit, dan ketersediaan abstrak yang bisa diverifikasi langsung lewat pembacaan halaman artikel. Total dua puluh satu sumber lolos verifikasi langsung, tujuh belas artikel primer dan empat tinjauan literatur pembanding, dan dijadikan dasar bagian Hasil.

Pendekatan ini setara dengan scoping review tingkat awal, bukan systematic literature review penuh. Pencarian tidak mencakup ekspor sistematis dari database akademik terkurasi seperti Scopus, Web of Science, atau Garuda, dan tidak mencatat angka lengkap pada setiap tahap identifikasi, penyaringan, dan kelayakan sesuai diagram alur PRISMA. Kriteria inklusi dan eksklusi yang dipakai mengikuti semangat protokol sebelumnya, yaitu entitas sektor publik, keterkaitan dengan minimal satu dimensi ESG dalam konteks anggaran atau pengadaan publik, dan sumber yang bisa diverifikasi, tetapi diterapkan secara manual pada hasil pencarian web, bukan pada hasil ekspor basis data terstruktur. Satu sumber, Santos (1998), disertakan meski abstraknya tidak berhasil diakses, karena statusnya sebagai rujukan klasik asal-usul participatory budgeting membuatnya relevan disebut sebagai konteks sejarah, dengan catatan eksplisit bahwa temuan rincinya belum terverifikasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Studi Primer

Tabel berikut merangkum tujuh belas studi primer yang lolos verifikasi langsung.

Penulis, Tahun	Dimensi ESG	Konteks	Metode	Temuan kunci
Capelle-Blancard dkk, 2017	G (dan lintas E/S/G)	Negara OECD, pasar obligasi negara	Kuantitatif, panel	Kinerja ESG menurunkan spread obligasi negara. Dimensi governance berpengaruh lebih kuat dibanding sosial, dimensi lingkungan sendiri tidak signifikan.
Grillos, 2017	S (participatory budgeting)	Kota Surakarta (Solo), Indonesia	Analisis data bertahap	Alokasi anggaran infrastruktur bias terhadap wilayah miskin, bias muncul di tahap pengajuan proposal, bukan di tahap implementasi.

Fithriyah, 2017	S (gender responsive budgeting)	Nasional, Indonesia	Naratif kebijakan, deskriptif	GRPB diadopsi 36 kementerian dan 34 provinsi pada 2014, didorong Gender Analysis Pathway sejak 1999, tapi artikel tidak mengukur dampak fiskal atau outcome anggaran secara empiris.
Soli, Mutia, Tanjung, 2026	S dan G	Desa Simbur Naik, Indonesia	Studi kasus kualitatif	Pemerintah desa sudah berupaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas, tapi partisipasi publik tetap rendah. Memakai Stewardship Theory, Good Governance, dan perspektif akuntansi syariah.
Li, Meydan, Wei, Zhao, 2025	E (green budget revenue)	107 negara, panel 2000-2021	Kuantitatif, data panel	Pendapatan anggaran hijau mendorong produktivitas dan pembangunan berkelanjutan, efek lebih kuat di negara non-OECD dan yang tekanan fiskalnya rendah.
Awudu, Nugraha, Furqon, Sari, Yuliawati, 2025	E (green budget tagging)	Pemerintah lokal Ghana (MMDAs)	Kuantitatif, moderasi	Beberapa praktik hijau berdampak positif pada keberlanjutan fiskal, tapi green budget tagging justru menunjukkan efek moderasi negatif yang tidak terduga, transportasi berkelanjutan tidak signifikan.

Oppi, Cavicchi, Vagnoni, 2021	S (gender-responsive budgeting)	Universitas Ferrara, Italia, 2011-2018	Kualitatif, analisis konten	GRB berevolusi dari fungsi akuntabilitas menjadi alat pengukuran kinerja, tapi integrasi dengan strategi dan siklus anggaran tetap terbatas, segregasi gender vertikal dan horizontal masih persisten.
Guariso, Guerrero, Castañeda, 2023	E/G (SDG budget tagging otomatis)	Meksiko, Uruguay, Kolombia	NLP dan machine learning	Akurasi pelabelan anggaran SDG tinggi, 82 sampai lebih dari 90 persen, saat model dilatih dan diuji pada negara yang sama, tapi turun tajam lintas negara, menunjukkan konteks kelembagaan sangat menentukan.
Coghill, Buchholz, Waheduzzaman, 2026	G (transparansi fiskal)	Pemerintah lokal Australia dan Jerman	Studi kasus komparatif, kerangka PEFA	Transparansi paling kuat di area yang diatur ketat seperti pengadaan dan audit eksternal, area diskresioner bervariasi luas, dipengaruhi komitmen politik, kapasitas institusional, dan kematangan digital.
Park, Butler, Petrovsky, 2023	S dan G	Pemerintah lokal Korea Selatan, data 7 tahun	Kuantitatif, regresi variabel instrumental	Partisipasi publik dan deliberasi selama anggaran partisipatif berasosiasi positif dengan keseimbangan fiskal, tapi kualitas keterlibatan yang menentukan, bukan

				sekadar keberadaan mekanismenya.
Côme, Magne, Steyer, 2023	S (participatory budgeting)	Paris, Prancis, 4043 proyek 2014-2021	Kuantitatif skala besar	Pemilihan kata pada judul proyek memengaruhi alokasi dana. Anggaran partisipatif berfungsi lebih sebagai alat komunikasi politik dibanding mekanisme partisipasi warga yang autentik.
Herrera, 2024	E, dengan dimensi keadilan distributif (S)	Afrika, Amerika Latin, dan AS: San Francisco, Cape Town, Mexico City	Kualitatif, analisis kritis keadilan iklim	Obligasi hijau munisipal berlabel hijau tetap bisa menghasilkan ketidakadilan distributif. Di Cape Town, perangkat manajemen air justru membatasi akses air bersih rumah tangga berpenghasilan rendah.
Navarro-Galera, Alcaraz-Quiles, Ortiz-Rodriguez, 2018	E dan G (transparansi keberlanjutan)	91 kotamadya, 9 negara Eropa	Kuantitatif, analisis konten pengungkapan	Rata-rata hanya 53 persen item pedoman GRI diungkap. Negara Nordik dan Anglo-Saxon lebih transparan dibanding Eropa Selatan, budaya administratif nasional jadi penentu kunci.
Polzer & Seiwald, 2021	S (gender-responsive budgeting)	Austria, tingkat pemerintah federal	Kualitatif, model difusi inovasi Rogers	Keberhasilan GRB bergantung pada dukungan legislatif yang kuat, tapi pedoman yang terlalu rinci dapat

				membatasi kemajuan. Masih ada celah signifikan dalam analisis GRB di beberapa sektor pemerintah, implementasi sering berhenti pada tahap formal, belum sampai substantif.
Grandia & Voncken, 2019	E dan S (pengadaan publik berkelanjutan)	Pemerintah Belanda, survei daring	Kuantitatif, survei	Kemampuan, motivasi, dan kesempatan mendorong green public procurement, tapi tidak ditemukan anteseden signifikan untuk jenis pengadaan sosial. Temuan pada pengadaan hijau tidak bisa digeneralisasi ke jenis pengadaan berkelanjutan lain.
Bryngemark, Söderholm, Thörn, 2023	E (pengadaan publik hijau)	140 kotamadya, Swedia	Kuantitatif, survei	Kotamadya besar lebih mungkin punya strategi GPP tapi kurang berdisposisi menerapkan kriteria hijau dalam tender. Sentralisasi pengadaan menciptakan efisiensi, tapi memperbesar jarak organisasi antara unit pengadaan dan lingkungan.
Santos, 1998	S (asal-usul participatory budgeting)	Porto Alegre, Brasil	Studi kasus klasik	Rujukan klasik yang mendokumentasikan kelahiran participatory budgeting di Porto Alegre. Abstrak dan temuan rinci belum

				berhasil diakses lewat pencarian terbuka, dicantumkan sebagai konteks sejarah, bukan dasar klaim empiris.

3.2 Tinjauan Literatur Pembanding

Empat tinjauan literatur berikut dipakai sebagai pembanding cakupan dan sumber identifikasi gap, bukan sebagai studi primer.

Penulis, Tahun, Jurnal	Fokus dimensi	Temuan/gap yang relevan
Polzer, Nolte, Seiwald (2023), International Review of Administrative Sciences 89(2)	S, gender budgeting	Studi terkonsentrasi pada tahap ex ante, tahap concurrent dan ex post kurang dipahami, kurang kontribusi dari perspektif akuntansi publik.
Bartocci, Grossi, Mauro, Ebdon (2023), International Review of Administrative Sciences	S, participatory budgeting	SLR atas participatory budgeting, dipakai sebagai pembanding cakupan, isi detail belum dibaca penuh.
Mol, van Schie, Budding (2025), Financial Accountability & Management	E/G, sustainability reporting pemerintah daerah	Tinjauan terstruktur atas pendorong pelaporan keberlanjutan pemerintah daerah, isi detail belum dibaca penuh.
Markovič Hribernik, Bratić, Prijaković (2025), Lex localis	G, kredibilitas anggaran	Variasi luas dalam definisi dan pengukuran kredibilitas anggaran menyebabkan temuan penelitian empiris sulit dibandingkan satu sama lain.

3.3 Sintesis per Pertanyaan Penelitian

Pemetaan ke dimensi ESG: ketujuh belas studi primer bisa dipetakan ke salah satu dimensi ESG atau lebih, sekitar tujuh ke dimensi environmental, delapan ke dimensi social, dan lima ke dimensi governance dengan beberapa studi tumpang tindih di lebih dari satu dimensi, tetapi tidak satu pun yang secara eksplisit memakai kerangka ESG sebagai payung

analitis dalam mendesain penelitiannya. Istilah ESG secara harfiah hanya muncul pada studi Capelle-Blancard dkk (2017), dan itu pun dalam konteks pasar obligasi negara, bukan siklus anggaran domestik. Studi Guariso dkk (2023) memakai payung SDG, bukan ESG, meski secara substansi tumpang tindih dengan dimensi environmental dan governance. Dua studi baru pada putaran perluasan ini, Grandia dan Voncken (2019) serta Bryngemark dkk (2023), menambah sub-tema baru yang sebelumnya belum tercakup, yaitu pengadaan publik berkelanjutan atau sustainable dan green public procurement, yang relevan dengan dimensi environmental tapi jarang dibahas bersama green budgeting dalam satu kerangka.

Teori yang digunakan: teori yang muncul pada studi yang terverifikasi bervariasi dan tidak menunjukkan satu kerangka dominan. Soli, Mutia, dan Tanjung (2026) memakai kombinasi Stewardship Theory, prinsip Good Governance, dan perspektif akuntansi syariah. Herrera (2024) memakai kerangka keadilan iklim dengan tiga pilar pengakuan, prosedur, dan distribusi. Sebagian besar studi lain bersifat deskriptif atau berbasis analisis data kuantitatif tanpa kerangka teori tunggal yang eksplisit disebutkan dalam abstrak yang terverifikasi, menunjukkan bahwa literatur ini juga belum matang secara teoretis, bukan hanya secara tematik.

Metode yang dominan: studi pada dimensi environmental dalam sampel ini cenderung kuantitatif dengan data panel lintas negara, seperti Li dkk (2025) yang memakai data 107 negara, dan Navarro-Galera dkk (2018) yang memakai analisis konten pengungkapan pada 91 kotamadya di sembilan negara Eropa. Studi pada dimensi social dalam sampel ini bervariasi metodenya, dari kualitatif dan naratif kebijakan seperti Grillos (2017) dan Fithriyah (2017) di Indonesia, sampai kuantitatif skala besar seperti Côme dkk (2023) yang menganalisis lebih dari empat ribu proyek di Paris, dan regresi variabel instrumental seperti Park dkk (2023) di Korea Selatan.

Kesenjangan yang teridentifikasi: pertama, tidak ada studi dalam sampel yang menyatukan dimensi E dan S sekaligus dalam satu desain penelitian pada konteks anggaran domestik, meski Herrera (2024) mendekati irisan itu lewat isu keadilan distributif pada obligasi hijau. Kedua, studi Fithriyah (2017) bersifat naratif kebijakan dan tidak mengukur dampak fiskal GRPB secara empiris, sejalan dengan kritik Polzer dkk (2023) soal kurangnya kontribusi perspektif akuntansi publik pada literatur gender budgeting. Ketiga, tiga studi dalam sampel ini, Awudu dkk (2025), Herrera (2024), dan Polzer serta Seiwald (2021) untuk Austria, sama-sama menunjukkan bahwa instrumen atau kebijakan yang secara formal berlabel hijau atau responsif gender tidak otomatis menghasilkan dampak substantif, sebuah nuansa yang jarang muncul pada literatur kebijakan yang lebih preskriptif seperti panduan OECD. Keempat, studi Grandia dan Voncken (2019) menunjukkan bahwa temuan pada satu jenis pengadaan berkelanjutan, misalnya pengadaan hijau, tidak bisa digeneralisasi ke jenis pengadaan berkelanjutan lain seperti pengadaan bersifat sosial, sebuah peringatan metodologis yang relevan juga untuk sintesis lintas dimensi ESG secara umum.

4. Pembahasan

Temuan sintesis ini memperkuat argumen yang dibangun sejak tahap protokol, bahwa literatur green budgeting dan participatory budgeting

berkembang pada jalur yang terpisah. Bahkan dalam sampel yang sudah diperluas menjadi tujuh belas studi ini, tidak ada satu studi pun yang secara desain menyatukan kedua topik itu di bawah kerangka ESG. Ini bukan bukti bahwa integrasi ESG dalam anggaran publik mustahil dilakukan, tetapi bukti bahwa integrasi itu belum menjadi praktik riset yang mapan, sehingga ruang untuk kontribusi konseptual masih terbuka.

Tema kritis pertama yang muncul kuat dari sintesis yang diperluas ini adalah bahwa pelabelan tidak sama dengan substansi. Awudu dkk (2025) menemukan efek moderasi negatif dari green budget tagging di Ghana. Herrera (2024) menemukan bahwa obligasi hijau munisipal berlabel hijau di Cape Town, San Francisco, dan Mexico City tetap bisa menghasilkan ketidakadilan distributif, bahkan pada satu kasus perangkat manajemen air justru membatasi akses air bersih rumah tangga miskin. Kedua studi ini berasal dari konteks berbeda dan memakai metode berbeda, tapi sama-sama menantang asumsi bahwa instrumen fiskal berlabel hijau otomatis menghasilkan outcome yang baik. Untuk konteks Indonesia, ini relevan karena wacana green budgeting dan climate budget tagging di tingkat pemerintah daerah selama ini cenderung preskriptif, mengasumsikan tagging sama dengan dampak positif, padahal bukti dari dua konteks berbeda ini menunjukkan sebaliknya.

Tema kritis kedua adalah kualitas partisipasi lebih menentukan dibanding keberadaan mekanisme partisipasi. Park dkk (2023) di Korea Selatan menemukan bahwa partisipasi publik berasosiasi positif dengan keseimbangan fiskal, tapi secara eksplisit menyatakan bahwa kualitas keterlibatan yang penting, bukan sekadar keberadaannya. Grillos (2017) di Solo menemukan bias alokasi terhadap wilayah miskin pada tahap pengajuan proposal, bukan pada tahap implementasi. Côme dkk (2023) di Paris bahkan berargumen lebih tajam, bahwa participatory budgeting di sana berfungsi sebagai alat komunikasi politik dibanding mekanisme partisipasi warga yang autentik. Tiga studi dari tiga benua berbeda ini, meski tidak bisa digeneralisasi secara kaku karena berbeda konteks kelembagaan, bersama-sama membentuk pola yang konsisten, bahwa dimensi social dalam ESG-budgeting tidak cukup diukur dari keberadaan mekanisme partisipasi, tetapi harus diukur dari kualitas dan hasil partisipasi itu sendiri.

Pada dimensi governance, temuan Coghill dkk (2026) bahwa transparansi fiskal kuat pada area yang diatur ketat tapi lemah pada area diskresioner, sejalan dengan temuan Navarro-Galera dkk (2018) bahwa rata-rata kotamadya Eropa hanya mengungkap 53 persen item pedoman GRI, dengan kesenjangan signifikan antara negara Nordik dan Eropa Selatan. Pola ini menunjukkan bahwa transparansi bukan kondisi biner ada atau tidak ada, melainkan spektrum yang dipengaruhi budaya administratif dan kapasitas institusional, sejalan dengan temuan Markovič Hribernik dkk (2025) soal inkonsistensi pengukuran kredibilitas anggaran antar studi.

Tema kritis ketiga, yang baru terlihat jelas setelah sampel diperluas, adalah jarak antara implementasi formal dan implementasi substantif. Polzer dan Seiwald (2021) menemukan bahwa gender-responsive budgeting di Austria, salah satu negara dengan mandat GRB paling matang secara konstitusional, tetap menghadapi celah antara kepatuhan administratif dan analisis gender

yang sungguh-sungguh di beberapa sektor pemerintah. Temuan ini sejalan dengan Soli dkk (2026) di Indonesia, yang menemukan pemerintah desa sudah berupaya transparan secara formal tapi partisipasi publik tetap rendah. Kesamaan pola antara negara dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Austria dan pemerintah desa di Indonesia menunjukkan bahwa jarak implementasi-substansi ini kemungkinan bersifat struktural pada instrumen ESG-budgeting secara umum, bukan sekadar masalah kapasitas negara berkembang. Pada dimensi pengadaan publik, temuan Grandia dan Voncken (2019) bahwa pendorong pengadaan hijau tidak berlaku sama untuk pengadaan sosial, serta temuan Bryngemark dkk (2023) bahwa kotamadya besar di Swedia justru kurang berdisposisi menerapkan kriteria hijau meski punya strategi GPP, memperkuat kesimpulan yang sama, bahwa keberadaan kebijakan atau strategi formal tidak boleh disamakan dengan pelaksanaan substantifnya.

5. Keterbatasan

- Sampel sumber masih kecil untuk topik seluas manajemen anggaran sektor publik, dua puluh satu sumber tidak merepresentasikan populasi literatur yang sebenarnya, meski cakupan geografisnya sudah cukup luas.
- Pencarian memakai mesin pencari web, bukan ekspor sistematis dari database akademik terkurasi, sehingga rentan bias terhadap artikel yang lebih mudah diindeks mesin pencari, termasuk artikel open access dan artikel dari jurnal yang kurang selektif.
- Tidak ada proses screening dua pemeriksa independen, seleksi dilakukan oleh satu proses otomatis dengan verifikasi manual, sehingga rawan bias subjektif dalam penentuan relevansi.

6. Kesimpulan dan Saran

Sintesis awal ini menunjukkan bahwa literatur green budgeting dan participatory budgeting, termasuk anggaran responsif gender, berkembang secara terpisah dan belum disatukan di bawah kerangka ESG. Ruang kontribusi paling kuat bukan mengklaim topik ini belum pernah disentuh, karena review pada masing-masing topik sudah ada, melainkan menyatukan dua aliran literatur ini secara eksplisit sekaligus menjawab agenda penelitian yang diusulkan Polzer dkk (2023) soal perspektif akuntansi publik pada gender budgeting.

Saran untuk langkah berikutnya: jalankan pencarian sistematis penuh sesuai protokol PRISMA pada Scopus, Google Scholar, dan Garuda, dengan pencatatan jumlah artikel lengkap pada setiap tahap. Setelah itu, perluas jumlah studi primer jauh melebihi dua puluh satu yang ada di naskah ini, lakukan screening dua pemeriksa independen jika memungkinkan, dan baru kemudian naskah ini layak diklaim sebagai Systematic Literature Review yang lengkap. Sebelum tahap itu dijalankan, naskah ini sebaiknya diperlakukan sebagai draf kajian awal untuk keperluan internal atau bahan presentasi seminar, bukan naskah siap submit ke jurnal manapun.

Daftar Pustaka

Awudu, S., Nugraha, Furqon, C., Sari, M., & Yuliawati, A. K. (2025). The moderating role of green budget tagging on budgeting practices and fiscal policy sustainability in Ghana's local government. Khazanah Sosial, 7(2), 524-538.

Bartocci, L., Grossi, G., Mauro, S. G., & Ebdon, C. (2023). The journey of participatory budgeting: A systematic literature review and future research directions. International Review of Administrative Sciences.

Bryngemark, E., Söderholm, P., & Thörn, M. (2023). The adoption of green public procurement practices: Analytical challenges and empirical illustration on Swedish municipalities. Ecological Economics, 204, Part A.

Capelle-Blancard, G., Crifo, P., Diaye, M-A., Oueghlissi, R., & Scholtens, B. (2017). Environmental, social and governance (ESG) performance and sovereign bond spreads: An empirical analysis of OECD countries.

Coghill, K., Buchholz, G., & Waheduzzaman, W. (2026). Innovating fiscal transparency through open government partnerships: A comparative study of local governments in Australia and Germany. Administrative Sciences, 16(2), 106.

Côme, T., Magne, S., & Steyer, A. (2023). Participatory budgeting: Behind the words, the euros. Empirical study of 4043 projects in Paris (2014-2021). Dalam Participatory and Digital Democracy at the Local Level, Contributions to Political Science.

Fithriyah. (2017). Indonesia's experience: Implementing gender responsive planning and budgeting. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning.

Grandia, J., & Voncken, D. (2019). Sustainable public procurement: The impact of ability, motivation, and opportunity on the implementation of different types of sustainable public procurement. Sustainability, 11(19), 5215.

Grillos, T. (2017). Participatory budgeting and the poor: Tracing bias in a multi-staged process in Solo, Indonesia. World Development, 96, April 2017.

Guariso, D., Guerrero, O. A., & Castañeda, G. (2023). Automatic SDG budget tagging: Building public financial management capacity through natural language processing. Data & Policy, 5, e31.

Herrera, H. (2024). The proliferation of municipal green bonds in Africa and Latin America: The need for a climate justice approach. Environment & Urbanization, 36(1).

Li, Y., Meydan, A. G., Wei, C., & Zhao, G. (2025). How does green budget revenue policy promote economic sustainable development? Empirical evidence from 107 global economies. Frontiers in Environmental Science, 13.

Markovič Hribernik, T., Bratić, V., & Prijaković, S. (2025). Economic and political determinants of local government budget credibility: A review of empirical evidence. Lex localis - Journal of Local Self-Government.

Mol, A., van Schie, V., & Budding, T. (2025). Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review. Financial Accountability & Management.

Navarro-Galera, A., Alcaraz-Quiles, F. J., & Ortiz-Rodriguez, D. (2018). Enhancing sustainability transparency in local governments: An empirical research in Europe. Sustainability, 10(7), 2161.

Oppi, C., Cavicchi, C., & Vagnoni, E. (2021). The journey to gender-responsive budgeting: Lessons learned from higher education. Sustainability, 13(4), 2019.

Park, J., Butler, J. S., & Petrovsky, N. (2023). Understanding public participation as a mechanism affecting government fiscal outcomes: Theory and evidence from participatory budgeting. Journal of Public Administration Research and Theory, 33(2).

Polzer, T., & Seiwald, J. (2021). Gender-responsive budgeting in Austria: The narrow line between implementation and confirmation. Public Money & Management, 41(7), 527-538.

Polzer, T., Nolte, I. M., & Seiwald, J. (2023). Gender budgeting in public financial management: A literature review and research agenda. International Review of Administrative Sciences, 89(2).

Santos, B. de S. (1998). Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy. Politics & Society, 26(4), 461-510. Catatan: abstrak belum terverifikasi, dikutip sebagai rujukan konteks sejarah.

Soli, T., Mutia, A., & Tanjung, F. S. (2026). Analysis of transparency, accountability and community participation in village fund financial management. Journal of Accounting Inquiry.